

Program Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kebumen

Anggun Pria Wibowo^{1*}, Umi Listyaningsih¹, Wiwik Puji Mulyani¹, Agus Joko Pitoyo¹

¹Universitas Gadjah Mada, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 29 December 2023

Accepted 17 May 2024

Available online 31 August 2024

Kata Kunci:

Penerapan,
Kampung Keluarga
Berkualitas,
Kesejahteraan Masyarakat

Keywords:

Implementation,
Kampung Keluarga
Berkualitas,
Public Welfare

ABSTRAK

Peningkatan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi oleh pemerintah. Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) merupakan inovasi pemerintah dalam rangka memperkuat target pembangunan, kesejahteraan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. KKB Desa Ungaran, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah telah berdiri sejak tahun 2018 dan merupakan KKB percontohan tingkat Kabupaten. Riset ini bertujuan guna menganalisis penerapan program KKB yang telah berjalan serta menganalisis dampak program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Informan dalam riset ini diambil dengan teknik purposif (*purposive sampling*). Data riset diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Langkah analisis data menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tahapan; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil riset menunjukkan bahwa struktur pengurus dan program KKB Desa Ungaran telah berjalan sistematis dan rutin. Program unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya produk jahe merah instan serta Program Pangan Lestari (P2L).

ABSTRACT

Improving welfare is still homework that continues to be addressed by the government. Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) is a government innovation in order to strengthen development targets, welfare, population control and family planning. KKB Ungaran Village, Kebumen, Central Java has been established since 2018 and is a pilot KKB at the district level. This research aims to analyze the implementation of the ongoing KKB program and analyze the impact of the program in improving the welfare of local communities. Informants in this study were taken using a purposive sampling technique. Research data was obtained using interview, observation and documentation techniques. The data analysis steps use data analysis from Miles and Huberman which consists of stages; data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that the management structure and KKB program of Ungaran Village have been running systematically and routinely. Flagship programs in order to improve community welfare include instant red ginger products and the Sustainable Food Program (Program Pangan Lestari (P2L)).

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



* Corresponding author.

E-mail addresses: anggun.pria.wibowo@mail.ugm.ac.id, umilis@ugm.ac.id, wpuji@ugm.ac.id, aguspit@ugm.ac.id

1. Pendahuluan

Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 270,2 jiwa. Jumlah penduduk hasil SP 2020 bertambah sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta jiwa setiap tahunnya jika dibandingkan hasil SP 2010. Meskipun jumlah penduduk mengalami kenaikan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia memiliki kecenderungan menurun. Berdasarkan hasil SP 2020 laju pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25 persen. Laju pertumbuhan penduduk tersebut melambat dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 1,49 persen. Salah satu penyebab menurunnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah karena kebijakan pemerintah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang telah diluncurkan sejak tahun 1980-an. Keluarga Berencana atau KB merupakan sebuah program dengan skala nasional yang bertujuan untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk di suatu negara. Program KB juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan, dan kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual penduduk. Kesejahteraan dan pemerataan memang masih menjadi sebuah cita-cita dan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintahan Indonesia. Terlebih situasi pasca pandemi Covid 19 yang membuat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial pun makin terang dan nyata meski pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi melalui program pemulihan ekonomi nasional. (Rosyadi, 2021), (Shabia, Setyabudi Gusti Nur Asla & Pratiwi, 2022). Dalam rangka memperkuat target pembangunan, kesejahteraan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemerintah melalui BKKBN berinovasi dengan membuat program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) yang sekarang telah berganti nama menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (KKB).

Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat (Hardiani, H., Hastuti, D., & Nasution, 2021). Sebagai sebuah pendekatan pembangunan yang bersifat universal, serta guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemberdayaan penguatan institusi keluarga, maka perlu didorong penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa atau kelurahan (Nofianti, 2023). Pelaksanaan program keluarga berencana memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan para anggota keluarga (Arlan, 2019), (Shimeng, 2017), (Cooper CM, Charurat E, 2016). Riset Xinxin Mu di China menunjukkan bahwa elastisitas pendapatan antargenerasi cenderung menurun seiring dengan bertambahnya jumlah keluarga (Mu & Chen, 2022). Selain itu kebijakan keluarga berencana mempunyai dampak yang sangat besar di China dalam hal budaya, pembangunan ekonomi, tunjangan anak dan keamanan hari tua (M. Wang, 2021), (Yi, 2013), (G. Li, 2018).

Kabupaten Kebumen adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang saat ini tengah menggencarkan program Kampung KB. Menurut data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kebumen merupakan kabupaten termiskin di Jawa Tengah tahun 2019. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang gencar dilakukan saat ini adalah dengan mendirikan program Kampung Keluarga Berkualitas (KKB). Dinas Sosial Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa KKB merupakan salah satu 'senjata pamungkas' baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan terutama di wilayah-wilayah yang jarang terlihat oleh pemerintah. Selain untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, program ini juga merupakan upaya untuk mensejajarkan daerah tertinggal dengan daerah lainnya. Kampung Keluarga Berkualitas kedepannya akan menjadi ikon Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran KKB diklaim dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam membangun keluarga kecil berkualitas. Hingga saat ini, Kabupaten Kebumen memiliki 77 KKB yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari 77 KKB yang sudah dibentuk, terdapat satu KKB yang menjadi percontohan atau dapat disebut Kampung Keluarga Berkualitas "COE" (Center of Excellence). KKB yang menjadi percontohan di Kabupaten Kebumen adalah KKB Sejahtera yang terletak di Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun. Pada awal dicanangkan tanggal 30 April 2018, cakupan wilayahnya adalah RW yaitu RW 1 Dukuh Srasutan. Adapun kriteria dipilihnya Dukuh Srasutan sebagai KKB antara lain kesertaan ber-KB rendah (kurang dari 60%), masalah administrasi kependudukan (banyak warga yang belum memiliki akta kelahiran), belum adanya penampungan sampah secara terpadu, dan kurangnya kemampuan masyarakat mengelola potensi yang ada didaerahnya. Saat ini KKB Sejahtera telah berubah cakupannya dari tingkat RW menjadi tingkat Desa. Seiring perkembangan program, KKB di Desa Ungaran Kecamatan Kebumen saat ini menjadi program percontohan di Kabupaten Kebumen.

Artikel ini mencoba memaparkan seperti apa implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas yang telah dilaksanakan. Pemilihan KKB “COE” Sejahtera sebagai lokasi penelitian karena KKB tersebut merupakan KKB percontohan yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga menarik untuk diteliti bagaimana implementasi program-program KKB khususnya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen serta dapat menjadi contoh bagi KKB daerah lainnya.

2. Metode

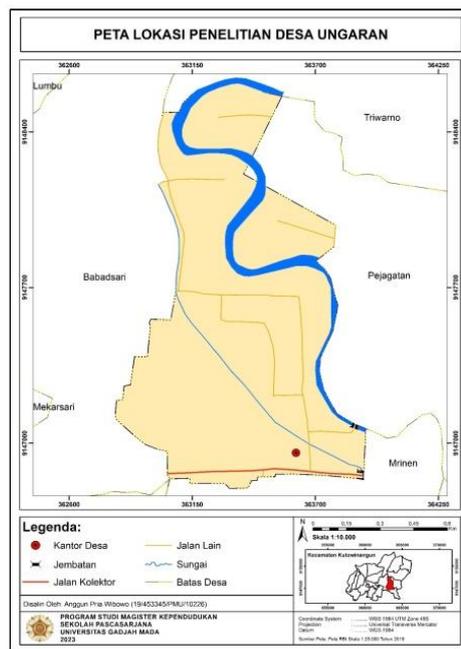
Riset dalam artikel ini adalah tipe penelitian deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi riset di Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposif (*purposive sampling*), yakni menentukan sampel penelitian dengan cara memilih atau menunjuk secara sengaja untuk dijadikan informan. Informan dalam riset ini yaitu ketua PLKB Kecamtan Kutowinangun, Ketua Pokja Kampng KB serta masyarakat yang menerima manfaat langsung program etrsebut.

Data riset diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Langkah analisis data menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tahapan; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2005). Hasil data penelitian yang diperoleh kemudian direduksi dan diuji validitas dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil data dipadukan dengan mengaitkan dan mengkaji dengan literatur dan riset terdahulu yang relevan

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Kampung KB di KKB Sejahtera Desa Ungaran

Kebupaten Kebumen Jawa Tengah memiliki sekitar 77 Kampung Keluarga Berkualitas (KKB). KKB di Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun merupakan KKB yang menjadi percontohan atau dapat disebut Kampung Keluarga Berkualitas “COE” (Center of Excellence).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber kunci, sasaran dari program Kampung KB adalah masyarakat umum atau semua kalangan karena dari usia bayi sampai dengan lansia, masyarakat akan mendapat program masing-masing sesuai dengan kelompok usianya Bahkan sebelum bayi dilahirkan, calon orang tua atau calon pengantin terlebih dahulu di bina agar nantinya bisa memiliki anak yang berkualitas. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan ketua PLB Kecamatan Kutowinangun.

“Jadi kalau untuk program Kampung Keluarga Berkualitas itu sesuai dengan programnya BKKBN, program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) itu pembangunan keluarga sendiri kita mulai intervensinya dari balita bahkan sekarang kita malah mulainya dari Catin (Calon Pengantin), jadi calon pengantin 3 bulan sebelum menikah dilakukan pendampingan oleh tim pendamping keluarga”.(WW Ketua PLB Kec Kutowinangun)

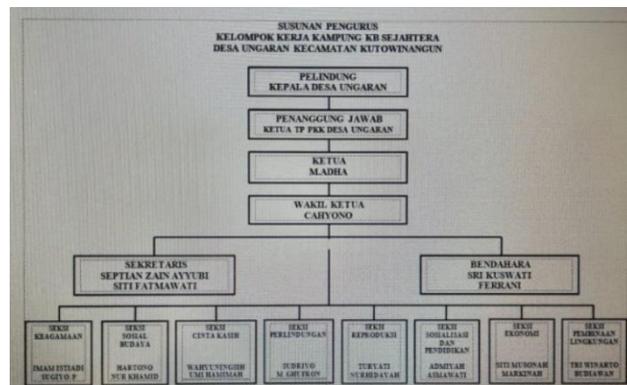
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat yang disampaikan oleh M. Adha selaku Ketua Pokja (Kelompok Kerja) dan Seksi Ekonomi Kampung KB “COE” Sejahtera Desa Ungaran. Beliau mengungkapkan bahwasanya sasaran dari program Kampung KB adalah semua kalangan masyarakat mulai dari balita sampai lansia nantinya akan mendapat program dari Kampung KB.

“Kampung KB itu uniknya disini, karena ternyata dalam Kampung KB yang diurusi itu sejak dari balita sampai lansia termasuk usia produktif. Cuma kan masing-masing kita punya kelompok sasaran, seperti balita ada sendiri (posyandu dll) yang remaja juga ada. Kalau secara usia itu hampir semua, jadi Kampung KB masuk di semua lini mulai dari lahir sampai meninggal.” (WW Ketua Pokja)

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa sasaran dari program Kampung KB adalah seluruh lapisan masyarakat mulai dari usia balita sampai dengan lansia. Hal tersebut sekaligus menepis anggapan yang selama ini beredar di masyarakat jika program Kampung KB hanya berfokus pada KB saja seperti alat kontrasepsi dan sasarannya hanya PUS (Pasangan Usia Subur).

Program yang dijalankan dalam Kampung KB terdapat 2 jenis, yaitu program yang berasal dari pemerintah (program Bangga Kencana) dan program yang berasal dari masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya, program yang berasal dari pemerintah sudah sepenuhnya bisa berjalan karena memang mendapat pendanaan langsung dari pemerintah pusat. Sementara itu, untuk usulan-usulan program yang berasal dari masyarakat tidak semua bisa dijalankan karena setelah proses penyusunan program langkah selanjutnya masih harus di sinergikan dengan pendanaan yang berasal dari desa. Meskipun demikian, program-program masyarakat yang tidak mendapat dana dari desa terkadang masih bisa berjalan dengan sumber pendanaan lain seperti dari lintas sektor yang terkait, misalnya dari Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan. Hasil tersebut berdasarkan wawancara dengan ketua Pokja Kampung KB;

“Beberapa contoh yang bisa kita sinergikan diantaranya ada BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), dan BKL (Bina Keluarga Lansia). Jadi dari program itu desa mensupport dari segi pendanaan. Selama ini karena komunikasi dengan pihak desa sangat baik jadi kita bisa mendapat sebagian pendanaan dari desa.” (WW Ketua Pokja)



Gambar 2. Struktur Pengruus Kampung KB Sejahtera

Strategi Kampung KB dalam meningkatkan kesejahteraan dilaksanakan melalui program-program yang dijalankan di Kampung KB yang memang memang berfokus pada kesejahteraan masyarakat meskipun belum sampai pada taraf mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua PLKB Kecamatan Kutawinangun, yang mengatakan:

“Mungkin kalau secara langsung mengentaskan kemiskinan program kita belum sampai disitu, cuma kan kalau program Kampung KB di dalam wilayah itu selain dari BKKBN, Pemerintah Desa kan ada disitu, terus masyarakatpun juga ada berbagai sektor termasuk PKK, BPD, dan lain lain itu kan berkumpul bersama terkait dengan musdes anggaran desa, itu bisa untuk ini misalnya ketika di Desa Ungaran ada yang rumahnya RTLH (Rumah Tidak Layah Huni) itu bisa kita ajukan”.

Sementara itu menurut Ketua Pokja Kampung KB menambahkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengurus Kampung KB dan pemerintah desa telah bekerja sama untuk membuat produk unggulan yaitu jahe merah instan. Untuk memperoleh bahan baku (jahe merah), Pokja Kampung KB menggandeng stakeholder yang ada di masyarakat yaitu kelompok tani (Gapoktan) guna mengembangkan tanaman jahe merah. Selain itu, Pokja Kampung KB juga membagikan bibit jahe

merah kepada masyarakat dengan harapan nantinya bisa di tanam di rumah masing-masing dan jika sudah saatnya panen hasilnya akan di beli oleh Pokja Kampung KB untuk kemudian di olah menjadi jahe merah instan. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kampung KB memiliki berbagai macam upaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya meningkatkan kesejahteraan secara langsung bisa dilihat dari adanya produk unggulan dalam Kampung KB (jahe merah instan) dimana masyarakat bisa terlibat dan merasakan dampaknya dengan cara ikut menanam jahe merah dan hasilnya bisa dijual kepada Pokja Kampung KB. Sedangkan upaya meningkatkan secara tidak langsung bisa dilakukan dengan cara melakukan pendataan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu, seperti masyarakat yang memiliki RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Setelah didapatkan data tersebut, pihak Pokja Kampung KB memberikan usulan langsung kepada pemerintah agar nantinya jika ada bantuan, masyarakat tersebut bisa diprioritaskan. Hasil wawancara diatas diperkuat oleh hasil observasi dan dokumentasi lapangan terkait pelaksanaan program Kampung KB.



Gambar 3. Panen Jahe Merah oleh Warga



Gambar 4. Produk Jahe Merah Kampung KB



Gambar 5. Launching Program Atasi Stunting

Peran Program Kampung KB dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Berbagai program yang telah dijalankan dalam Kampung KB, beberapa diantaranya memang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Pada Kampung KB COE Sejahtera Desa Ungaran memiliki rumah produksi yang memang khusus digunakan untuk membuat produk unggulan Kampung KB berupa jahe merah instan yang penjualannya hingga ke luar negeri. Hal ini berdasarkan wawancara dengan informan Seksi ekonomi Kampung KB:

"Secara umum bagi Pokja Kampung KB itu ada dapur tersendiri dengan nama Kelompok Kampung KB Sejahtera UPPKS Pamuji, yang dipusatkan menjadi dapur di Rumah Bu Tri Winarto (salah satu warga Kampung KB). Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga terus merambah ke masyarakat. Alhamdulillah untuk penjualan (jahe merah instan) sudah sampai ke luar negeri dengan cara online. Sistimnya itu kata orang Jawa "getok tular" jadi ada teman di Jakarta terus "getok tular" ke Lampung terus ke yang lain. Kemarin baru saya kirim ke Taiwan produknya, itu lewat teman juga."

Dari produk tersebut, banyak masyarakat yang terbantu perekonomiannya karena dari masing-masing rumah memang diharapkan bisa menanam jahe merah yang bibitnya bisa diambil secara gratis. Setelah ditanam, hasilnya nanti bisa dijual kepada Pokja Kampung KB untuk kemudian diolah menjadi jahe merah instan. Selain adanya produk unggulan tersebut, program lain yang turut berdampak pada kesejahteraan masyarakat adalah adanya Program Pangan Lestari (P2L). Program ini merupakan program lintas sektor yang bersumber dari Distapang (Dinas Ketahanan Pangan) dengan cara membuat perkebunan sayur mayur terpusat dan di sekitar rumah yang memiliki lahan kosong. Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga dan jika melebihi maka hasilnya bisa dijual sehingga bisa menambah penghasilan. Kelompok P2L Desa Ungaran merupakan kelompok bentukan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kutowinangun. Kegiatannya adalah menanam sayuran berbagai jenis. Konsep yang dipakai adalah tanaman organik. Tujuannya menyediakan kebutuhan sayur bagi masyarakat. Selain itu mendukung program percepatan penurunan stunting dengan memanfaatkan bahan lokal. Selain itu seluruh rangkaian kegiatan dan program dari KKB Desa Ungaran telah dimuat di website resmi bkkbn (<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/6080/intervensi?page=1>). Hal ini tentunya menjadi hal yang baik dalam rangka menularkan program-program yang telah berjalan selama ini agar bisa diikuti oleh desa dan wilayah lainnya. Program kegiatan pangan lestari ini mendukung riset terdahulu oleh Astawa bahwa pengembangan program pembangunan sektor di Kampung KB mencakup paling tidak di empat bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman, dan lingkungan (Astawa, 2018).



Gambar 6. Panen Sayur Program Pangan Lesatai (P2L) Kampung KB

Berdasarkan hasil riset diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program kampung KB di KKB Sejahtera Desa Ungaran dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Berbagai program yang telah berjalan dinilai telah memberikan dampak dan manfaat bagi warga setempat khususnya serta masyarakat di luar desa. Temuan ini memperkuat riset-riset terdahulu yang telah lebih awal mengkaji mengenai keefektifan program kampung KB. (Juliarta, 2022), (Anggraini, T., & Mashur, 2019), (Apriani, E., Darmayati, N., & Muhamad, 2021), (Nurjannah, S. N. Susanti, 2018). Pelaksanaan program di KKB Desa Ungaran juga turut melebur dengan kegiatan-kegiatan yang lebih dulu berjalan di masyarakat setempat. Misalnya saja posyandu pengajian hingga penyuluhan. Hal ini juga dialami di beberapa daerah misal pada Suku Dani Papua, penerapan kebijakan program keluarga berencana melebur dengan kebudayaan warga setempat seperti norma adat, norma perkawinan, adat kehamilan dan kelahiran (Palutturi & Hasanuddin, 2020). Beberapa kendala pelaksanaan program yang sering dihadapi yaitu terkait musim kemarau yang sedikit menjadi kendala dalam pelaksanaan penanaman tanaman produk unggulan. Kendala tersebut juga dirasakan oleh Astawa dalam risetnya terdahulu (Astawa, 2018). Dan pada akhirnya tujuan dan kebermanfaatan program kampung keluarga berencana yang sekarang berubah menjadi kampung keluarga berkualitas (KKB) tidak hanya membahas mengenai pembatasan jumlah anak saja (F. Wang et al., 2016), (Li, 2022), (Ozbalci, 2016). Kebermanfaatan KKB nyatanya bermakna luas untuk kesejahteraan warga dan masyarakat secara umum. Pada akhirnya kolaborasi antara masyarakat desa dan pemerintah setempat menghasilkan program kegiatan yang berdampak bagi masyarakat sekitar dan masyarakat luas (Yunas & Nailufar, 2019).

4. Simpulan dan saran

Hasil riset mengenai penerapan program Kampung Keluarga Berkualitas (KKB) di Desa Ungaran Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa KKB yang mulai berdiri sejak 2018 telah memiliki struktur pengurus yang sangat sistematis serta program-program unggulan yang telah berjalan baik. Seluruh stakeholder dari tingkat desa hingga Kabupaten dan masyarakat telah bersinergi bersama sehingga keberadaan KKB dirasakan oleh semua lapisan masyarakat mulai dari pasangan calon pengantin, ibu hamil, bayi, balita masyarakat hingga lansia. Beberapa program unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya produk jahe merah instan dan Program Pangan Lesatari (P2L). Selain itu program-program rutin seperti psosyandu balita dan lansia juga berbagai penyuluhan telah rutin dilaksanakan. Meski tidak secara langsung mengentaskan kemiskinan, namun berbagai kebermanfaatannya dari program KKB telah dirasakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya sekaligus bisa menjadi percontohan praktik baik bagi desa lain karena dokumentasi seluruh kegiatan juga telah diunggah di website BKKBN. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menemukan program-program terbaru yang inovatif dan bisa dijadikan percontohan bagi program kampung KB di wilayah lainnya.

Ucapan terimakasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Universitas Gadjah Mada terutama Ibu Bapak dosen pembimbing dan penguji; Dr. Umi Listyaningsih, S.Si., M.Si.; Dr. RR. Wiwik Puji Mulyani, M.Si.; Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A. Tak lupa pula kepada masyarakat Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen sebagai lokasi pengambilan data riset dalam artikel ini.

Daftar Rujukan

- Anggraini, T., & Mashur, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*, 6(2), 1–11.
- Apriani, E., Darmayati, N., & Muhamad, I. (. (2021). Efektivitas Program Kampung KB Di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Swarnabhumi*, 6(1), 38–45.
- Arlan, A. S. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Al'iidara Balad*, 37–44.
- Astawa, I. B. M. (2018). Menggali dan Mengidentifikasi Permasalahan - Permasalahan Kampung Keluarga Berencana. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Cooper CM, Charurat E, E.-A. I. (2016). Postpartum Family Planning During Sociopolitical Transition: Findings from an Integrated Community-Based Program in Egypt. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*.
- G. Li, J.-Y. Z. (2018). A Comparative Study on the Human Development Index between China and India. *China Population Science*, 2, 13–23.
- Hardiani, H., Hastuti, D., & Nasution, H. (2021). Community Participation in the Kampung KB Program in Jambi Province. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 9(1).
- Juliarta, I. W. S. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung KB dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Rejasa. 10(3), 224–232.
- Li, Y. (2022). *The Influence of China 's Two - child Policy on the Labor Market From the Perspective of Social and Economic Aspects*. 631(October 2015), 1399–1403.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mu, X., & Chen, S. (2022). Family-Size Effect on Intergenerational Income Mobility under China's Family Planning Policy: Testing the Quantity–Quality Trade-Off. *Sustainability (Switzerland)*, 14(19). <https://doi.org/10.3390/su141912559>
- Nofianti, N. (2023). Improving Family Economy through the Quality Family Village Program (Kampung KB) in Sumurbatu Village, Cikeusik District, Pandeglang Regency, Banten Province. *MOVE: Journal of Community Service and Engagement*, 2(6), 198–206. <https://doi.org/10.54408/move.v2i6.229>
- Nurjannah, S. N. Susanti, E. (2018). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi Kuantitatif dan Kualitatif). *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 9(2), 27–33.
- Ozbalci, B. C. N. U. M. O. O. S. Z. C. D. S. T. A. G. K. S. (2016). Maternal health and Family Planning Distance Education" experience among physicians: a three-phase study to determine the educational needs, develop program, and evaluate efficacy of the education administered education. *Advances in Medical Education and Practice*.
- Palutturi, S., & Hasanuddin, U. (2020). *Implementation of family planning program policy based on culture in Jayawijaya Province of Papua*. September. <https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.00695.2>
- Rosyadi, K. (2021). Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Jawa Timur: Refleksi Sosiologis. *Prosiding*

Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 1, 1-6.

- Shabia, Setyabudi Gusti Nur Asla, N. D. D., & Pratiwi, R. I. (2022). Kesejahteraan Yang Retak : Mengkritisi Upaya Pemulihan Pascapandemi Dari Posisi Indonesia Sebagai Negara Kesejahteraan. *Jurnal Masyarakat Indonesia, 48*(2), 161-176.
- Shimeng, S. (2017). The Effectiveness of 'Two-child' Policy to Solve China's Economic Problems. *Chinese Market*.
- Wang, F., Zhao, L., & Zhao, Z. (2016). China ' s family planning policies and their labor market consequences. *Journal of Population Economics*. <https://doi.org/10.1007/s00148-016-0613-0>
- Wang, M. (2021). *Analysis of the Impact of China's Family Planning Policy*. 516(Iserss 2020), 65-69. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.014>
- Yi, Z. (2013). Fertility policy adjustment and China's development. Beijing: *Social Sciences Archives Press*.
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2*, 162-173.